



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AIDIL FITRI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 676348

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.245.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/81 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000		
2. Tanah Seluas 1650 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, LAINNYA Rp. 165.000.000		
3. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
4. Tanah Seluas 1292 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 425.000.000		
5. Tanah Seluas 296.48 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
6. Tanah Seluas 868 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 95.000.000		
7. Tanah Seluas 868 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.000.000
1. MOTOR, HONDA NC12AF2CBI A/T / SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	41.687.098



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 1.297.687.098

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 1.297.687.098

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.